

**Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Sesuai Dengan Keppmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2023	Target Capaian						Kondisi Akhir	PD Penanggung jawab
														2024		2025		2026			
														K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	24	25	
Meningkatnya penyelenggaraan trantibumlinmas	Prersentase peningkatan trantibumlinmas di Kalbar	Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketentraman dan ketertiban di Kalimantan Barat	Persentase masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Persentase pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Persentase penanganan perda dan perkara yang ditegakan 3. Meningkatnya pembinaan masyarakat 4. Persentase cakupan Satlinmas	1. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Meningkatnya perda dan perkara yang ditegakan 3. Meningkatnya pembinaan masyarakat 4. Meningkatnya cakupan Satlinmas	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya pencegahan kejadian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam (satu) 1 daerah	Persentase pencegahan kejadian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam (satu) 1 daerah											100%	Satpol PP
													0 Dokumen	0 Dokumen	0 Jt	1 Dokumen	52 jt	1 dokumen	58 jt	2 Dokumen	Satpol PP
													1 Dokumen	1 Dokumen	7 jt	1 Dokumen	8 jt	1 Dokumen	9 jt	3 Dokumen	Satpol PP
													0 Orang	50 Orang	86 jt	50 Orang	95 jt	50 Orang	105 jt	150 Orang	Satpol PP
													0 Dokumen	0 Dokumen	0 jt	1 Dokumen	73 jt	1 dokumen	81 jt	2 Dokumen	Satpol PP

									Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	0 Dokumen	1 Dokumen	22 jt	1 Dokumen	25 jt	1 Dokumen	28 jt	3 Dokumen	Satpol PP
									Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	0 Unit	0 unit	0 jt	10 unit	400 jt	10 unit	440 jt	20 Unit	Satpol PP
									Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Dokumen	4 dokumen	277 jt	4 dokumen	305 jt	4 dokumen	336 jt	12 Dokumen	Satpol PP
									Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	1 laporan	21 jt	1 laporan	24 jt	1 laporan	27 jt	3 Laporan	Satpol PP
									Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	4 laporan	252 jt	4 laporan	278 jt	4 laporan	306 jt	12 Laporan	Satpol PP
									Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	70 Kasus	4 laporan	626 jt	4 laporan	690 jt	4 laporan	759 jt	12 Laporan	Satpol PP

									Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	50 Orang	200 orang	95 jt	200 orang	105 jt	200 orang	116 jt	600 Orang	Satpol PP	
									Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 kasus	4 laporan	81 jt	4 laporan	90 jt	4 laporan	99 jt	12 Laporan	Satpol PP	
								Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Meningkatnya Perda dan Perkada yang tegakan	Persentase Perda/Perkada yang ditegakan											Satpol PP
									Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	4 laporan	208 jt	4 laporan	229 jt	4 laporan	252 jt	12 Laporan	Satpol PP	
									Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	4 laporan	437 jt	4 laporan	481 jt	4 laporan	530 jt	12 Laporan	Satpol PP	
									Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	4 laporan	283 jt	4 laporan	312 jt	4 laporan	344 jt	12 Laporan	Satpol PP	

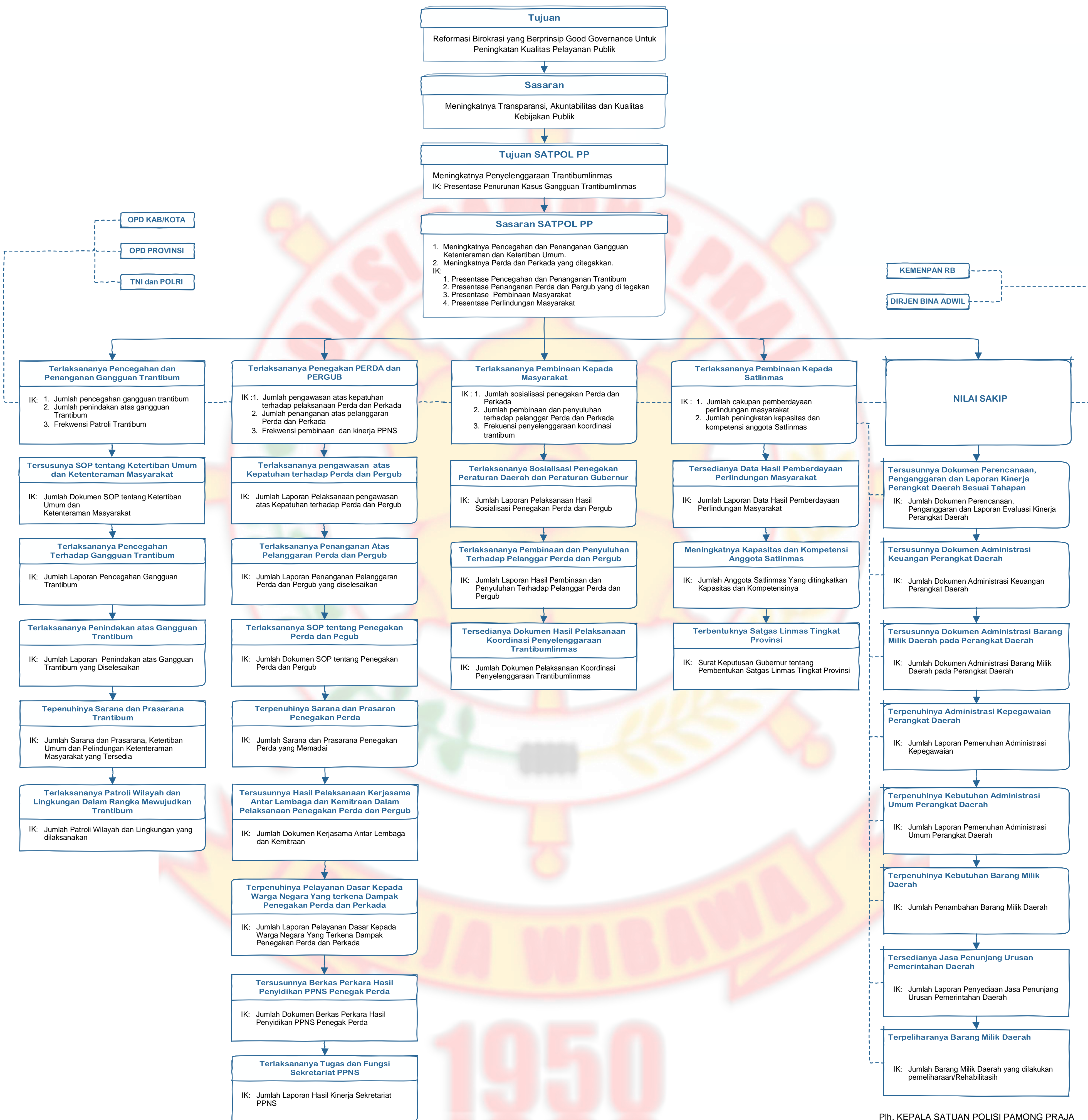
									Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	0 Unit	0 unit	0 jt	1 unit	15 jt	1 unit	18 jt	2 Unit	Satpol PP	
									Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	0 Laporan	1 laporan	77 jt	1 laporan	85 jt	1 laporan	94 jt	3 Laporan	Satpol PP	
									Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	0 Dokumen	1 Dokumen	5 jt	1 Dokumen	6 jt	1 Dokumen	7 jt	3 Dokumen	Satpol PP	
									Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	0 Laporan	0 laporan	0 jt	1 laporan	80 jt	1 laporan	88 jt	2 Laporan	Satpol PP	
									Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	0 Laporan	4 laporan	68 jt	4 laporan	75 jt	4 laporan	83 jt	12 Laporan	Satpol PP	
									Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	0 Dokumen	1 dokumen	58 jt	1 dokumen	64 jt	1 dokumen	71 jt	3 Dokumen	Satpol PP	
								Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Meningkatnya pembinaan PPNS Provinsi	Persentase PPNS yang kompeten											Satpol PP

									Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	0 laporan	0 jt	1 laporan	100 jt	1 laporan	110 jt	2 Laporan	Satpol PP
									Pembentukan Sekretariat PPNS	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	0 Dokumen	1 Dokumen	16 jt	1 Dokumen	18 jt	1 Dokumen	20 jt	3 Dokumen	Satpol PP
									Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	56 jt	1 Dokumen	62 jt	1 Dokumen	69 jt	3 Dokumen	Satpol PP
									Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	0 Laporan	4 laporan	167 jt	4 laporan	184 jt	4 laporan	203 jt	12 Laporan	Satpol PP
									Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Tersedianya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	0 Laporan	3 laporan	50 jt	3 laporan	55 jt	3 laporan	61 jt	9 Laporan	Satpol PP
									Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi											Satpol PP
									Pembentukan Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi	Terbentuknya Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Wilayah Provinsi	0 Dokumen	0 dokumen	0 jt	1 dokumen	31 jt	1 dokumen	35 jt	3 dokumen	Satpol PP

									Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Terbentuknya Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	0 Dokumen	0 dokumen	0 jt	1 dokumen	31 jt	1 dokumen	36 jt	3 dokumen	Satpol PP
									Fasilitasi Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten / Kota	Terfasilitasinya Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0 dokumen	0 jt	1 dokumen	220 jt	1 dokumen	245 jt	3 dokumen	Satpol PP
									Fasilitasi Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0 dokumen	0 jt	1 dokumen	220 jt	1 dokumen	245 jt	3 dokumen	Satpol PP

**Cascading Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Sesuai Dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023**

Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja Tahunan			Kondisi Akhir	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja Tahunan			Kondisi Akhir	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Tahunan			Sub Kegiatan	Sasaran sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Akhir			Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																								
			2024	2025	2026					2024	2025	2026								2024	2025	2026				2024	2025	2026																																																																																									
Meningkatnya penyelenggaraan trantibumlimmas di Kalbar	Persentase peningkatan trantibumlimmas di Kalbar	100	100	100	100	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	BB	BB	BB	A	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Nilai SAKIP	1. Nilai IKM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi capaian target Kinerja Program Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Tahapan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	19	19	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	6	SATPOL PP																																																																																								
																														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	3	SATPOL PP																																																																																
																																						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	3	SATPOL PP																																																																								
																																														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	3	SATPOL PP																																																																
																																																						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	3	SATPOL PP																																																								
																																																														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	5	3	11	SATPOL PP																																																
																																																																						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	12	SATPOL PP																																								
																																																																														Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1	1	3	SATPOL PP																																
																																																																																						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	3	SATPOL PP																								
																																																																																														Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	1	3	SATPOL PP																
																																																																																																						Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1	1	1	3	SATPOL PP								
																																																																																																														Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Terlaksananya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1	1	1	3	SATPOL PP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13	13	13	318	SATPOL PP																																																																																																														
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	4	12	SATPOL PP																																																																																																						



Plh. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

EDDY KARMILAN, S.H., M.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690501 199803 1 008

----- = Cross Cutting
—————> = Cascading